

PEMBANGUNAN WILAYAH PERMUKIMAN DENGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

studi kasus : kawasan permukiman Kalianak Surabaya

Ir. Wiwik Widyo W., MT.

Jurusan Teknik Arsitektur, FTSP - ITATS
Jl. Arief Rachman Hakim no. 100 Surabaya – 60117
Telp.(031) 5945043 Email : ww_widyo@yahoo.com

ABSTRAK

Lambannya pembangunan untuk memberantas kemiskinan disebabkan karena model pembangunan yang berlaku tidak memberi kesempatan pada rakyat ikut dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut pemilihan, perencanaan dan kemudian pelaksanaan program pembangunan. Dengan kata lain rakyat hanya sekedar sebagai obyek pembangunan. Paradigma ‘pemberdayaan masyarakat’ ingin mengubah kondisi ini dengan cara memberi kesempatan pada masyarakat untuk merencanakan dan kemudian melaksanakan pembangunan yang juga mereka pilih sendiri.

Pembangunan wilayah permukiman diharapkan mempunyai model pembangunan yang menjadikan kemakmuran masyarakat lapisan bawah dan orangnya sebagai modal, bukan beban. Ini dilakukan menyatu dengan pemanfaatan bumi, air dan semua kandungannya sebagai sumber daya bukan warisan kekayaan, dengan gaya pemerintahan yang lugas, terbuka, dan bersama.

Kata kunci : pembangunan wilayah permukiman, pemberdayaan masyarakat

I. PEMBANGUNAN WILAYAH PERMUKIMAN

Pembangunan wilayah merupakan suatu bidang yang masuk dalam konsep pembangunan dalam bentuk perencanaan wilayah dan cara-cara implementasinya, antara lain melalui penataan ruang. Pembangunan permukiman sebagai salah satu elemen dalam pembangunan wilayah, yang memanfaatkan ruang terbesar dari wilayah baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Pendekatan pembangunan permukiman dilakukan melalui : ¹

a. **Pembangunan Berkelanjutan dan Konsep Tridaya**

Dalam pembangunan permukiman dilaksanakan dengan mengutamakan pencapaian tujuan pembangunan lingkungan yang responsif namun secara komprehensif dapat mengakomodasikan dalam satu kesatuan sistem dengan pencapaian tujuan pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi. Konsep Tridaya, sebagai azas pelaksanaan pembangunan permukiman, yaitu bertujuan memberdayakan komponen sosial masyarakat, usaha dan ekonomi, serta lingkungan, tetap dapat di tumbuh kembangkan sebagai pendekatan pembangunan permukiman yang berkelanjutan di tingkat lokal. Pendekatan ini dilakukan dengan memadukan kegiatan-kegiatan penyiapan dan pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan pemberdayaan kegiatan usaha ekonomi komunitas dengan kegiatan pendayagunaan prasarana dan sarana dasar permukiman sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan.

b. **Secara Multisektoral dan Terdesentralisasi**

Pembangunan permukiman mencakup banyak kegiatan, antara lain pengalokasian ruang, penyediaan lahan, kelembagaan, kegiatan teknis teknologis, pembiayaan, dan sistem informasi. Disamping secara holistik, penyelenggaraan permukiman harus dilakukan secara **multisektoral** karena memerlukan koordinasi dengan berbagai bidang lain yang terkait dengan kegiatan pembangunan permukiman dan tidak dapat ditangani oleh satu sektor saja. Dalam kerangka **desentralisasi**, penyelenggaraan permukiman tidak dapat terlepas dari agenda pelaksanaan tata

¹ Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP), 2002, BKP4N – Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

pemerintahan yang baik di tingkat lokal, yaitu yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, pengawasan, penegakan hukum, serta efisiensi dan efektivitas.

c. Pembangunan Berwawasan Kesehatan

Kesehatan lingkungan permukiman sangat mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat yang menghuninya. Selain secara fisik harus memenuhi syarat rumah sehat, perilaku hidup sehat dari masyarakat sangat penting dan strategis untuk terus didorong dan ditumbuh kembangkan dalam penyelenggaraan permukiman.

d. Pengembangan Sistem Insentif

Dalam pembangunan permukiman, perlu di dalam penyelenggaraannya dikembangkan sistem insentif, yang diharapkan mampu mendorong berbagai pelaku pembangunan baik lembaga formal maupun informal untuk terlibat secara aktif. Upaya yang dikembangkan antara lain melalui kegiatan program stimulan, perintisan, dukungan pembiayaan dan bantuan teknis bagi pelaku pembangunan yang responsif di dalam penyelenggaraan permukiman, termasuk kegiatan pendampingan dalam penyiapan dan pemberdayaan masyarakat.

Melalui penataan kawasan dengan pendekatan kewilayahan, pembangunan permukiman menjadi bagian integral dari suatu skenario pembangunan daerah secara keseluruhan. Pembangunan permukiman dalam era reformasi menerapkan paradigma baru, yaitu :

- a. Bersifat holistik, dalam hal ini mempertimbangkan berbagai aspek legal dan teknis terkait.
- b. Berazaskan keadilan, keselarasan, perhatian dan perlindungan, serta jaminan kepastian hukum dalam bermukim.
- c. Bertumpu pada area development (pendekatan wilayah), yang berarti :
 - Mengacu pada suatu keterpaduan dalam pemanfaatan ruang (kegiatan yang tepat, pada tempat yang tepat).
 - Mengutamakan tercapainya keselarasan antar program dan kegiatan yang akan mengisi suatu wilayah.

- Menempatkan penghuni sebagai aktor utama pelaksanaan.
- d. Dilaksanakan secara integratif, koordinatif, efektif dan efisien.

II. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pembangunan permukiman diusahakan agar bersifat partisipatoris dan demokratis serta berbasis pada masyarakat dengan lebih menitik beratkan pada model bottom up sesuai dengan Habitat Agenda bahwa *'kebijaksanaan pembangunan dewasa ini tidak lagi melalui proses satu arah, melainkan harus ditempuh melalui dua arah yaitu dari atas ke bawah (top down –bottom up) dan sebaliknya'*. Hal tersebut didasarkan pada asumsi bahwa orang yang paling tahu kebutuhan dan problema riil yang dihadapi masyarakat adalah warga masyarakat itu sendiri. Dengan demikian maka diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi obyek tetapi juga menjadi subyek pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan adalah mewujudkan masyarakat sebagai pelaku penentu serta pusat kegiatan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dengan memobilisasi masyarakat melalui keikutsertaannya sejak perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan dari hasil-hasil pembangunan melalui azas :

- **Memampukan** ; mengupayakan akses masyarakat ke arah berbagai sumber kunci antara lain fasilitas pendanaan, teknologi, perijinan, penguasaan lahan.
- **Pemerataan** ; menjamin tersedianya kesempatan dalam memanfaatkan dan meraih peluang.
- **Partisipatif** ; perwujudan peran serta aktif dan nyata dari setiap pelaku pembangunan dalam menjalankan kegiatan yang dilandasi oleh tekad yang telah disepakati bersama.
- **Kemitraan** ; membangun prinsip-prinsip kemitraan antara pelaku pembangunan.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui **konsep Tribina** (bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan), yang sasarannya adalah untuk :

1. Memberikan iklim yang mendorong tumbuhnya potensi masyarakat dalam pembangunan.
2. Memberikan akses/kemudahan kepada masyarakat untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonominya dengan memberikan stimulan yang diperlukan.
3. Pola pembangunan dengan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dengan konsep Tribina dengan bertitik tolak “masyarakat sebagai pelaku pembangunan bukan penerima hasil pembangunan”. Sehingga pembangunan yang berorientasi dari, oleh dan untuk masyarakat, akan membuka peluang sebesar-besarnya bagi warga masyarakat untuk dapat berkreasi, berinovasi dan menyalurkan aspirasinya, sehingga dengan peluang tersebut diharapkan dapat membangkitkan keswadayaan masyarakat. Perubahan-perubahan ini sesuai dengan keputusan Menpera Nomor : 06/KPTS/1994 tanggal 13 September 1994, tentang pedoman umum pembangunan permukiman bertumpu pada kelompok yang secara garis besar menekankan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

III. KAWASAN PERMUKIMAN KALIANAK

Pembangunan wilayah permukiman di kawasan amatan dilaksanakan secara berencana dengan memperhatikan kemampuan dan daya dukung lingkungan selain itu pembangunan diarahkan agar terjadi hubungan yang harmonis antar wilayah pembangunan dalam lingkup kota Surabaya serta keharmonisan antar kota dengan lingkungannya.

Pemberdayaan masyarakat pada kawasan amatan yaitu sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mengutamakan pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan kejuruan dan pendidikan keahlian, yang dapat meningkatkan mutu penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan pengkajian dan ahli teknologi, sehingga produktivitas kerja tinggi dan mampu mengolah Pembangunan Daerah.
- b. Penguasaan mutu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah sebagai upaya mengentas masyarakat kurang mampu yang berada di kantong-

kantong kemiskinan, dalam arti memperkecil kesenjangan yang tajam, baik secara fisik, sosial dan ekonomi ;

- Peningkatan keterpaduan pembangunan sosial masyarakat [pembinaan peran serta masyarakat, pembinaan disiplin terpadu dengan penyuluhan/penertiban pada daerah yang mempunyai kantong-kantong kemiskinan kumuh].
 - Peningkatan penanganan perumahan dan pemukiman kumuh [penertiban pemukiman kumuh yang illegal, menetapkan program KIP, pembangunan rumah sangat sederhana, ijin lokasi dan IMB].
 - Peningkatan pembinaan sektor ekonomi masyarakat / sektor informal [membina lokasi PK-5 yang diresmikan, mengendalikan daerah operasi secara bertahap, khususnya di jalan protokol, membentuk badan pengelola kesehatan dan ekonomi masyarakat, membuka klinik usaha dan kesehatan, serta konsultasi alih profesi pemulung dan asongan].
- c. Pembinaan kependudukan, tenaga kerja dan keluarga sejahtera ;
- Pengendalian kependudukan untuk menurunkan tingkat kelahiran, kematian BALITA, serta meningkatkan usia harapan hidup dan menekan urbanisasi.
 - Peningkatan kesehatan tenaga kerja.
 - Peningkatan kualitas keluarga sehat, baik lahir maupun batin secara terpadu.

Kegiatan pembangunan yang telah dilakukan pada kawasan amatan dengan memberdayakan masyarakat antara lain ;

- Memprioritaskan masyarakat setempat untuk bekerja pada industri-industri yang ada di lingkungan permukiman. Dengan kondisi tingkat pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki oleh masyarakat maka biasanya mereka bekerja sebagai buruh industri.
- Tumbuhnya rumah produktif oleh masyarakat setempat, terutama disepanjang jalan Kalianak sebagai wujud kemandirian dari masyarakat dalam mengatasi faktor ekonomi masyarakat.
- Peningkatan sumberdaya masyarakat dengan diadakannya penyuluhan mengenai kesehatan masyarakat dan lingkungan permukiman di tingkat Kecamatan. Penyelenggaraan ini dengan maksud membangun kapasitas pengelolaan yang

bertumpu pada inisiatif dan partisipasi masyarakat, bersama kelompok swasta, lembaga swadaya masyarakat dan aparat pemerintah.

- Mendata masyarakat yang masih berada pada garis kemiskinan untuk mendapat prioritas pendanaan dalam peningkatan kualitas rumah dan sosial ekonominya (P2KP-Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan), pendanaan awal ini hanya sebagai pancingan yang kemudian diharapkan masyarakat dapat termotivasi untuk peningkatan lebih lanjut. Pengelolaan P2KP berupa dana bergulir dilakukan oleh masyarakat melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang menampung segala aspirasi masyarakat setempat.
- Partisipasi dari masyarakat dalam peningkatan kualitas permukiman, antara lain dengan pembangunan dan perbaikan prasarana jalan kampung, pembuatan balai warga yang semua itu untuk kepentingan bersama.
- Diadakannya rembuk bersama dari pihak masyarakat, swasta maupun pemerintah dalam mengatasi masalah lingkungan permukiman yang ada. Hal ini diharapkan dapat menggali aspirasi dari masyarakat setempat untuk tanggap lingkungan.

IV. USULAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERMUKIMAN DENGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KAWASAN PERMUKIMAN KALIANAK

- Dalam pembangunan wilayah terkait dengan perencanaan tata ruang, dan supaya dapat dihasilkan pembangunan yang optimal maka di dalam perencanaan tata ruang wilayah hendaknya lebih memperhatikan aspirasi masyarakat setempat selain mengikuti ketentuan yang telah digariskan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian maka secara langsung dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam melaksanakan rencana tata ruang wilayah.
- Pengembangan sistem informasi mengenai hak dan kewajiban masyarakat dengan pihak pemerintah maupun swasta serta adanya koordinasi yang baik antara ke tiga pelaku pembangunan tersebut.
- Pelestarian dan Pengelolaan kawasan lindung juga diprioritaskan dalam kebijakan-kebijakan yang berlaku pada kawasan permukiman Kalianak. Untuk saat ini

kurang mendapat perhatian akan keberlangsungan kawasan lindung tersebut yaitu berupa hutan bakau di tepi pantai sebelah utara jalan Kalianak.

- Pengawasan perkembangan tata ruang pada wilayah oleh semua pihak baik masyarakat, swasta dan pemerintah, untuk menghindari penyimpangan yang ekstrim terhadap rencana tata ruang, agar tidak menimbulkan permasalahan lingkungan permukiman di kemudian hari.
- Peningkatan dan pembinaan sumber daya masyarakat dan pengembangan lembaga swadaya masyarakat agar lebih siap dalam menghadapi era masa depan dengan menitik beratkan pada pembangunan yang berkelanjutan.
- Sesuai dengan otonomi daerah dengan konsep desentralisasi, maka di dalam konsep pembangunan wilayah hendaknya memperhatikan kondisi dan potensi yang spesifik pada kawasan amatan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP), (2002), BKP4N – Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.
2. Silas, Johan, (1992), Kampung Surabaya Menuju Metropolitan, Yayasan Keluarga Bhakti Surabaya dan Surabaya Post.
3. Sutrisno, Lukman, Memberdayakan Rakyat dalam Pembangunan Indonesia – kumpulan tulisan dalam buku Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Rakyat, 1995 : 139.
4. The Habitat Agenda, International, Goals and Principles, Commitmen and Global Plan of Action, UNCHS, Habitat II, Juni 1996
5. Undang-Undang Republik Indonesia no. 25 tahun 2000, tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000-2004.